



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda Nomor 294, Gd. Pemda I Lt. 4

Telp. (0272) 321046 Ps.306. Faks. (0272) 328730

KLATEN - 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pemdagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj IP adalah untuk:

(a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap issue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten *Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*.

Klaten, Maret 2017


Plt. BUPATI KLATEN
Sri Mulyani
Hj. SRI MULYANI

Eksekutif Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2016

disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan Kabupaten Klaten.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021, atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan evaluasi atas hasil pengendalian terhadap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 48 (empat puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya refresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

- A. **Indikator Progresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 80,49 % dengan kreteria ***Sangat Baik***, b. Sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 7,32 % dengan kreteria ***Tinggi***, c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kreteria ***Sedang***, d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kreteria ***Rendah***, dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 7,32 % dengan kreteria ***Sangat Rendah***. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***sangat baik***, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*), diantaranya :

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
6. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
7. Angka kelulusan SD/MI
8. Angka kelulusan SMP/ MTs
9. Persentase konsistensi perencanaan
10. Persentase penggunaan data statistik
11. Skor LPPD
12. Indeks Profesionalitas ASN
13. Opini BPK terhadap LKPD
14. Tingkat Muturitas SPIP
15. Tingkat Kapabilitas APIP
16. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
17. Indeks Kecukupan Pangan
18. Skor Pola Pangan Harapan
19. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
20. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
21. Persentase UMKM yang memiliki daya saing
22. Persentase kenaikan koperasi aktif
23. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
24. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani
25. Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan
26. Persentase jalan dalam kondisi baik (%)
27. Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
28. Luasan lahan irigasi dalam kondisi baik (%)
29. Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan
30. Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan
31. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
32. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
33. Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk

b. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja **$75,1 \leq 90$** sebanyak 4 (empat), diantaranya :

1. Persentase air minum layak
2. Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
3. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus

c. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja **$65,1 \leq 75$** sebanyak 1 (satu), diantaranya :

1. Persentase penanganan RTLH

d. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja **$50,1 \leq 65$** sebanyak 1 (satu), diantaranya :

1. Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak

e. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **sangat rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja **≤ 50** sebanyak 3 (tiga), diantaranya :

1. Skor LKjIP
2. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMDN
3. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMA

B. **Indikator Refresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 71,43 % dengan kreteria **Baik (Berhasil Menekan)**, b. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 28,57 % dengan kreteria **Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **baik**, diantaranya:

1. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
2. Persentase balita gizi buruk
3. Angka kematian bayi
4. Angka kematian balita
5. Angka kriminalitas

b. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **tidak baik**, diantaranya:

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
2. Angka kematian ibu melahirkan

C. Disamping itu ada 1 (satu) indikator, baik target maupun realisasi masih 0 (kosong), yakni indikator Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	ii
Kata Pengantar	iii
Eksekutif Summary	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar dan Grafik	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah	I-2
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	I-7
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-10
1.5 Isi Strategis.....	I-11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.....	II-14
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	III-7
3.3 Akuntabilitas Anggaran.....	III-50
3.4 Efisiensi Sumber Daya	III-56
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Saran Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2015	
Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten	

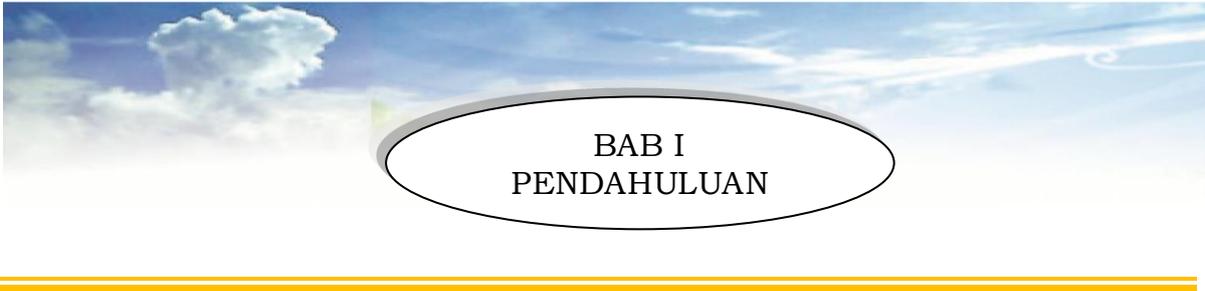
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015.....	I-5
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 (dalam Rp.Juta).....	I-9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	II-10
Tabel 2.2	Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	II-12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2016	II-14
Tabel 2.4	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat	III-8
Tabel 3.5	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	III-9
Tabel 3.6	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	III-9
Tabel 3.7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016.....	III-10
Tabel 3.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2012-2016.....	III-11
Tabel 3.9	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	III-11
Tabel 3.10	Perkembangan Angka Melanjutkan (AL) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016.....	III-12
Tabel 3.11	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	III-15
Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	III-19
Tabel 3.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	III-26
Tabel 3.14	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016	III-26
Tabel 3.15	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	III-29
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal	III-31
Tabel 3.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan	III-34

Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi	III-37
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III-38
Tabel 3.20	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman.....	III-41
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana.....	III-43
Tabel 3.22	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	III-44
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat	III-46
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	III-48
Tabel 3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-49
Tabel 3.26	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016	III-53

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan	I-1
Gambar 2.1	Korelasi antara Program Prioritas dan Misi Pembangunan Daerah ..	II-15
Gambar 3.1	Peringkat Kinerja Progresif	III-6
Gambar 3.2	Peringkat Kinerja Represif	III-7
Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2012-2016	I-4
Grafik 1.2	Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten tahun 2012-2016	I-6
Grafik 1.3	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2015	I-7
Grafik 1.4	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2012-2016	I-8
Grafik 1.5	Komposisi Komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada tahun 2015 dari masing-masing setor menurut lapangan usaha	I-10
Grafik 1.6	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016	I-11
Grafik 3.1	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	III-15
Grafik 3.2	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	III-16
Grafik 3.3	Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	III-17



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat posisi negara yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, berdaulat bersama rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report, 1990*).

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah
- 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
- 1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
- 1.5 Isu Strategis

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut sebagai dasar, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, dinyatakan bahwa bupati/walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Pemerintah Kabupaten Klaten akan mematuhinya.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

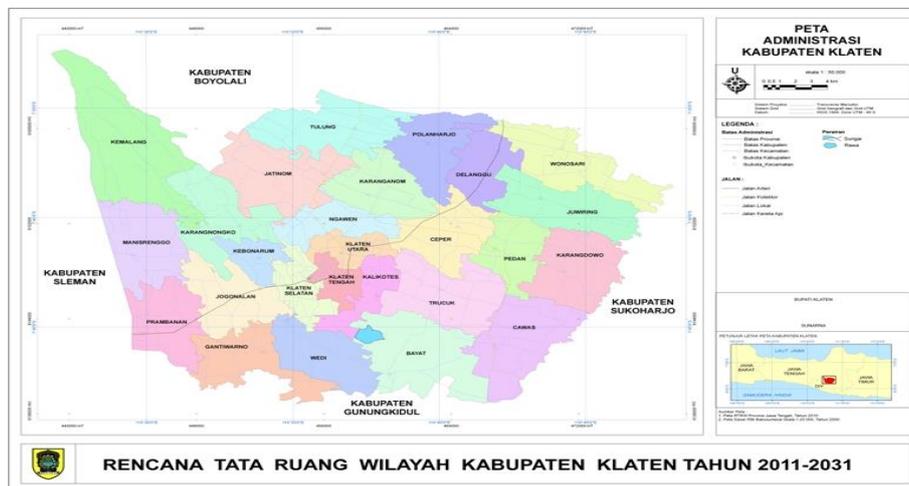
Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (65,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689 RW dan 9.592 RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2012-2016 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada tahun 2012, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2016 menjadi 33.066 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan:

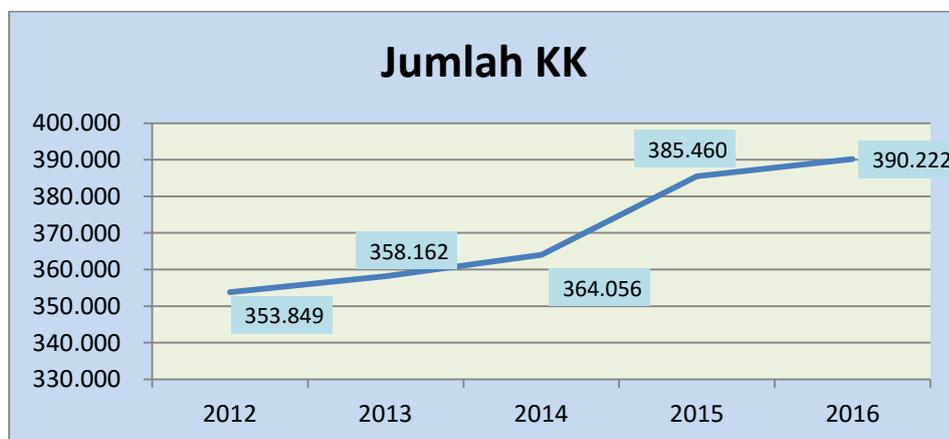
perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2016 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 1.300.706 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 649.239 jiwa, dan perempuan sebanyak 651.467 jiwa. Kepadatan penduduk 1.984 jiwa/km².

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Gambaran perkembangan jumlah KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 1.1



Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2012-2016
Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016.

Jumlah keluarga sebanyak 390.222 Kepala Keluarga sebagaimana tersebut pada Grafik 1.1, terdiri dari keluarga yang dikategorikan Pra Sejahtera sebanyak 67.400 KK, Sejahtera I sebanyak 83.239 Kepala Keluarga, dan Keluarga Sejahtera sebanyak 239.583 Kepala Keluarga.

1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riel Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.1
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015**

Indikator IPM	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Angka harapan Hidup (tahun)	76,47	76,52	76,54	76,55
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,43	7,74	7,92	8,16
Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,12	12,27	12,74	12,84
Pengeluaran Riel Per kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.858	10.962	10.965	11.178
IPM	71,71	72,42	73,19	73,81

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017



Gambaran Ideal Daur Siklus IPM

1.2.3 Kemiskinan

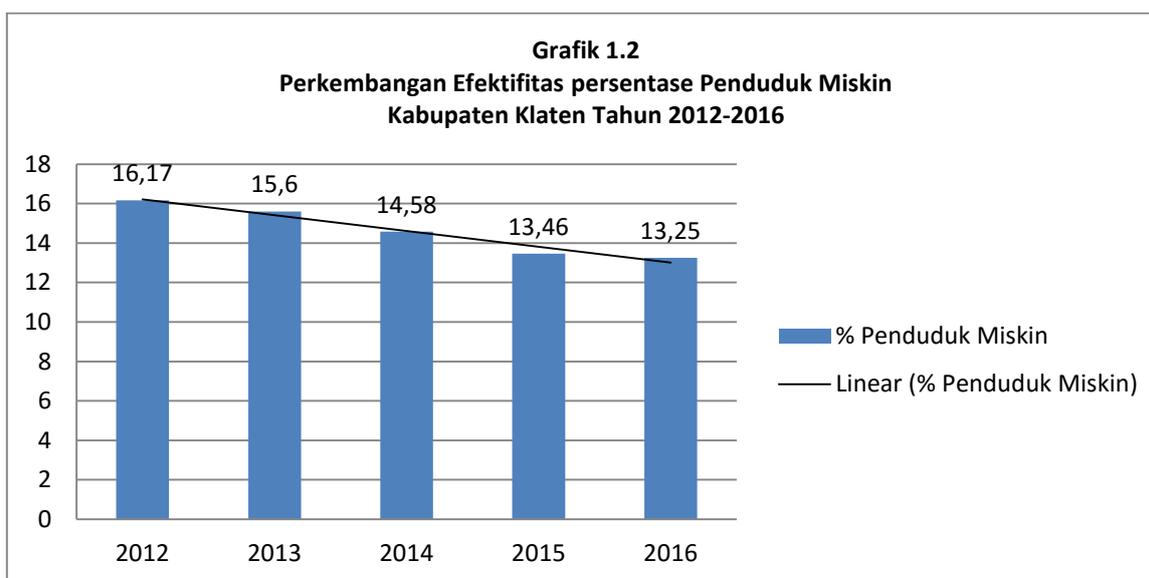
Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita.

Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 16,71% pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,25% pada tahun 2016 atau turun sebesar 3,46% selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 1.2



Grafik 1.2 Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

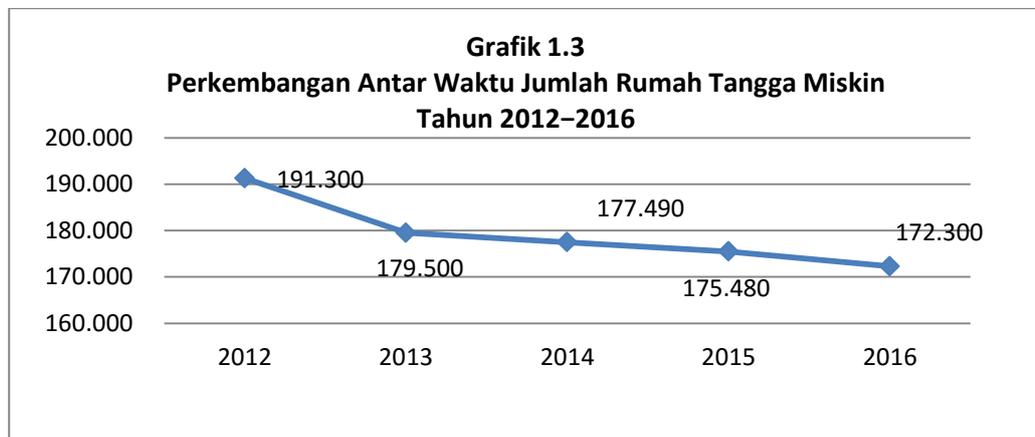
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten 2017, (diolah).

Pada Grafik 1.2 ditunjukkan perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir mengalami penurunan menjadi sebesar 13,25 % dengan rata-rata penurunan tiap tahun sebesar 0,69 %.

b. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Dalam rentang waktu 2012-2016, dari sebanyak 191.300 jiwa pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebanyak 172.300 jiwa pada

tahun 2016 atau turun sebanyak 19.000 jiwa. Pada Grafik 1.3 ditunjukkan jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif).



Catatan : Tahun 2016 angka sementara

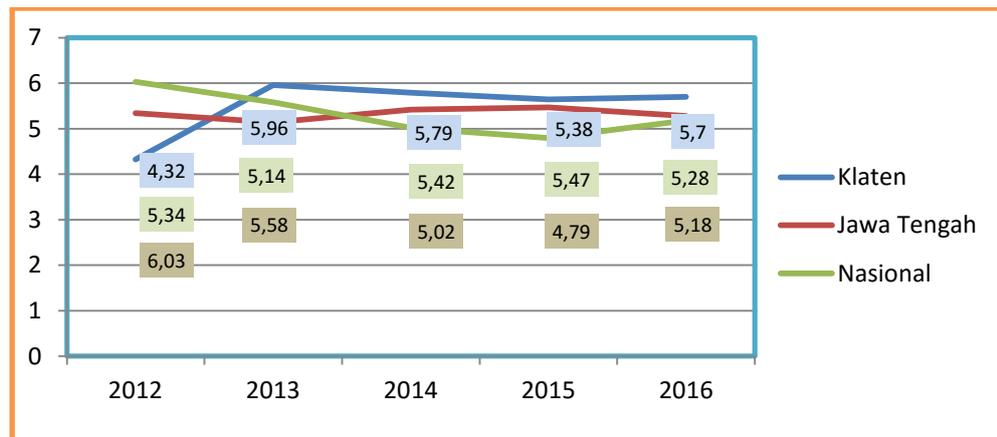


Gambaran Upaya yang Dilakukan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2012 tumbuh 4,32%, dan tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,96%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,79%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,64 %, dan tahun 2016 diperkirakan tumbuh berkisar sebesar 5,7%. Perbandingan pertumbuhan

perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Grafik 1.4



Grafik 1.4 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2012-2016
 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

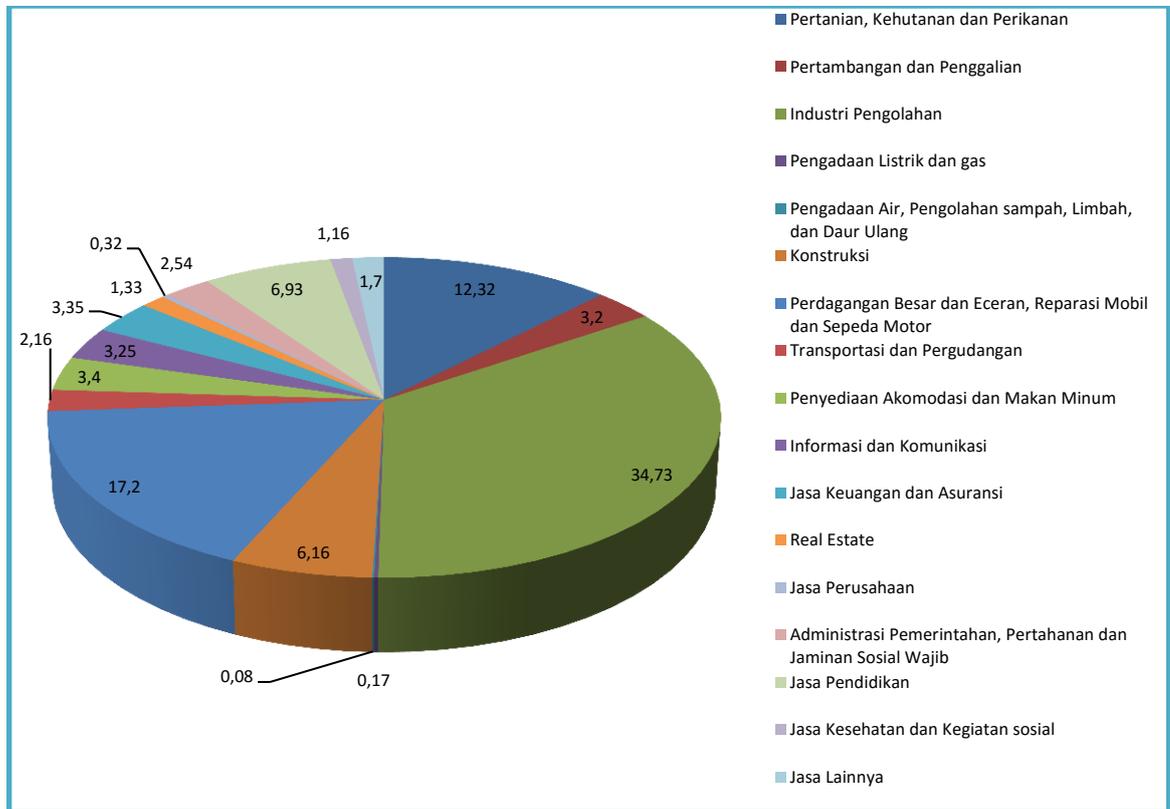
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2012-2015 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
 di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 (dalam Rp.Juta)**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.471.010,67	11,1	2.583.620,33	4,56	2.562.146,59	-0,83	2.554.458,51	0,02
2	Pertambangan dan Penggalian	523.680,55	3,87	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19	638.644,12	7,22
3	Industri Pengolahan	5.991.221,12	6,51	6.506.551,46	8,6	7.094.088,57	9,03	7.721.248,00	9,19
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.545,06	8,7	37.301,57	7,98	39.710,03	6,46	42.005,43	6,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.692,21	1,14	11.878,14	11,09	13.083,66	10,15	14.313,37	9,75
6	Konstruksi	1.199.173,63	2,55	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17	1.331.715,74	3,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.912.955,36	1,15	4.028.912,46	2,96	4.124.651,58	2,38	4.210.127,56	2,40
8	Transportasi dan Pergudangan	424.248,41	4,17	468.996,42	10,55	512.975,80	9,38	557.967,96	9,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733.824,99	2,26	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89	830.925,78	5,24
10	Informasi dan Komunikasi	722.286,22	2,11	749.129,31	3,72	778.393,63	3,91	806.240,57	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	637.716,58	6,26	701.765,45	10,04	717.168,09	2,19	731.672,67	2,35
12	Real Estate	272.023,36	3,62	290.530,05	6,8	316.062,61	8,79	343.878,40	9,15
13	Jasa Perusahaan	50.940,86	9,49	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41	70.636,45	7,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530.808,20	-0,10	543.501,77	2,39	540.694,79	-0,52	539.018,46	0,01
15	Jasa Pendidikan	1.085.188,87	23,09	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69	1.492.645,19	12,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	182.777,69	13,45	200.873,15	9,9	224.544,38	11,52	252.386,01	12,76
17	Jasa Lainnya	319.311,93	-1,18	354.825,20	11,12	385.231,09	8,57	413.412,62	7,66
Produk Domestik Regional Bruto		19.102.405,71	5,71	20.299.990,96	6,27	21.392.250,75	5,38	22.551.296,84	5,42

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2016 (diolah)

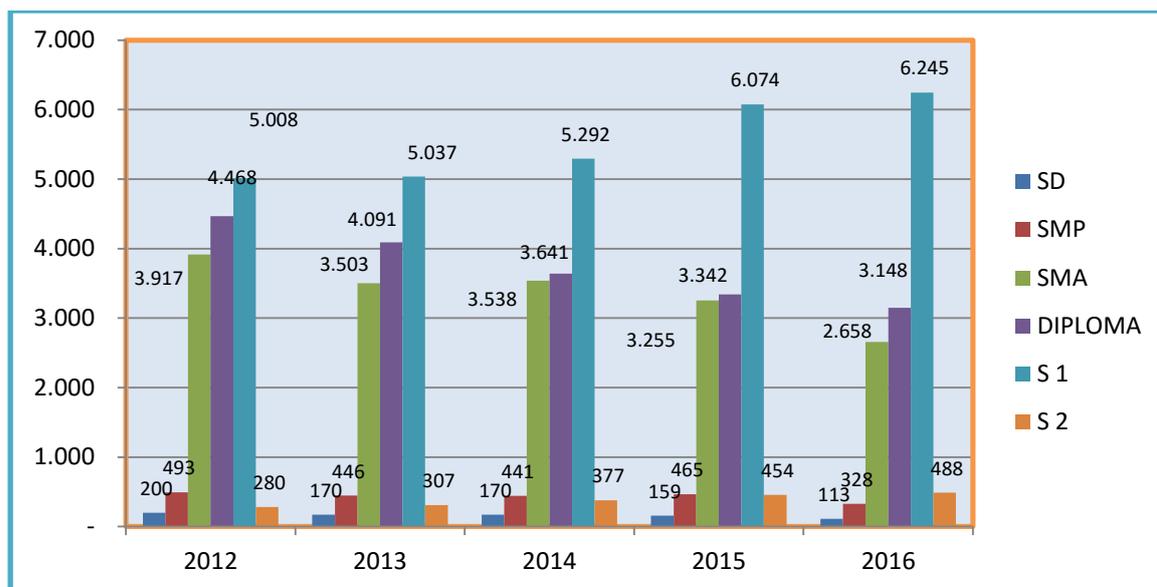
Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2015 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 19.102.405,71 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp. 22.551.296,84 pada tahun 2015. Adapun komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada tahun 2015 dari masing-masing setor menurut lapangan usaha sebagaimana Grafik 1.5



Grafik 1.5 Komposisi Komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada tahun 2015 dari masing-masing setor menurut lapangan usaha

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 12.979 orang, yang terdiri dari 5.908 orang (atau 45,52 %) Laki-laki, dan 7.072 orang (atau 54,48 %) perempuan. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.6



Grafik 1.6 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016
 Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah kabupaten Klaten, diantaranya :

1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas

Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas diibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupeten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku

yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju dan berdaya saing.

2. Pelayanan Kesehatan

Percepatan SDG's dan pencapaian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan pengertian:

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar

keteringgalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.

- Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan.

4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Isu keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah selalu terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Sekalipun langkah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah telah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, dan efisiensi dan efektivitas belanja daerah tetap saja keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik. Anggaran berbasis kinerja, dan anggaran berbasis beban kerja belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan, manakala penapisan permasalahan belum terurai terlebih dahulu.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2015) sebanyak 175.480 jiwa (13,46%). Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian semua pihak.

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanya pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk dilakukan.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

Isue adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

8. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.

Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan

perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang keairahan dalam berinvestasi.

9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Penanganan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
2.1 Rencana Strategis
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016
2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Tahun 2016

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *“Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: *“Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”*.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

<i>Pertama</i>	: Redi - tinamping , artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.
<i>Kedua</i>	: Jiwan - danarta , artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.
<i>Ketiga</i>	: Lir - ginelar , artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.
<i>Keempat</i>	: Pitraya - inyika , artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.
<i>Kelima</i>	: Andaya - wilang , artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa “ewuh pakewuh” tetaplh fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
<i>Keenam</i>	: Surya - sribhawanti , artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.
<i>Ketujuh</i>	: Rohartaya , artinya selalu harus insaf dan tawakal.
<i>Kedelapan</i>	: Traju - tresna , artinya arif dan bijaksana

14

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan,

papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;

Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan

Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat.

Sasaran : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun, Meningkatkan budaya baca masyarakat, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal, dan Meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dan Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.

Misi 2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah.

Arah kebijakan : Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa.

Arah kebijakan : Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja, Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah, serta Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah.

Misi 3

Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah

berbasis agropolitan, Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah, Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan, serta Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani.

Sasaran 2 : Meningkatkan dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, Pengembangan pusat promosi dan perdagangan, serta Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatkan dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan, serta Meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.

Sasaran 4 : Meningkatkan dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja.

Misi 4

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum

Arah kebijakan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah,

Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan pengelolaan persampahan, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman

Arah kebijakan : Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum jalan, dan makam, Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan, Meningkatkan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi, Pengembangan sumber daya energi terbarukan, serta Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.

Misi 5

Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran : Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan : Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai, Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, serta Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis *agro forestry*.

Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana, Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana, serta Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana.

Sasaran 2 : Terwujudnya kesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Arah kebijakan : Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan, Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana, serta Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi

fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.

Misi 6

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila.

Sasaran 1: Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila, Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta Meningkatkan perlindungan sosial.

Sasaran 2 : Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Arah kebijakan : Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai, Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat, serta Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Sasaran 3 : Terwujudnya akhlak yang mulia.

Arah kebijakan : Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan, serta Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan.

Sasaran 4 : Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama.

Arah kebijakan : Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

Misi 7

Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan

Arah kebijakan : Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan, Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan, serta Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.

Tujuan 2 : Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

Arah kebijakan : Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 3. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, 4. Perlindungan khusus, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, serta Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Misi 8

Meningkatkan kapasitas pelayanan publik;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas.

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, serta Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (*bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial*).

Sasaran 2 : Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan

ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
		1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
		1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
		1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
		1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
		1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
		1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
		1.9	Angka kelulusan SD/MI
		1.10	Angka kelulusan SMP/ MTs
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1	Persentase balita gizi buruk
		2.2	Angka kematian ibu melahirkan
		2.3	Angka kematian bayi
		2.4	Angka kematian balita
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	3.1	Persentase konsistensi perencanaan
		3.2	Persentase penggunaan data statistik
		3.3	Skor LPPD
		3.4	Indeks profesionalitas ASN
		3.5	Skor LKjIP
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4.1	Opini BPK terhadap LKPD
		4.2	Tingkat Muturitas SPIP
		4.3	Tingkat Kapabilitas APIP
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
		5.2	Indeks Kecukupan Pangan
		5.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	6.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		6.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
		6.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing
		6.4	Persentase kenaikan koperasi aktif
		6.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%)
			PMDN

			PMA
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	7.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
		7.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	8.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	9.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)
		9.2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
		9.3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	10.1	Persentase air minum layak
		10.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak
		10.3	rasio luasan kawasan kumuh perkotaan
		10.4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan
		10.5	Persentase penanganan RTLH
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	11.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	13.1	Angka kriminalitas
		13.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	14.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	15.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
		15.2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni **Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing** dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sarasannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Adapun pentahapan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dibagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan, sebagaimana Tabel 2. 2

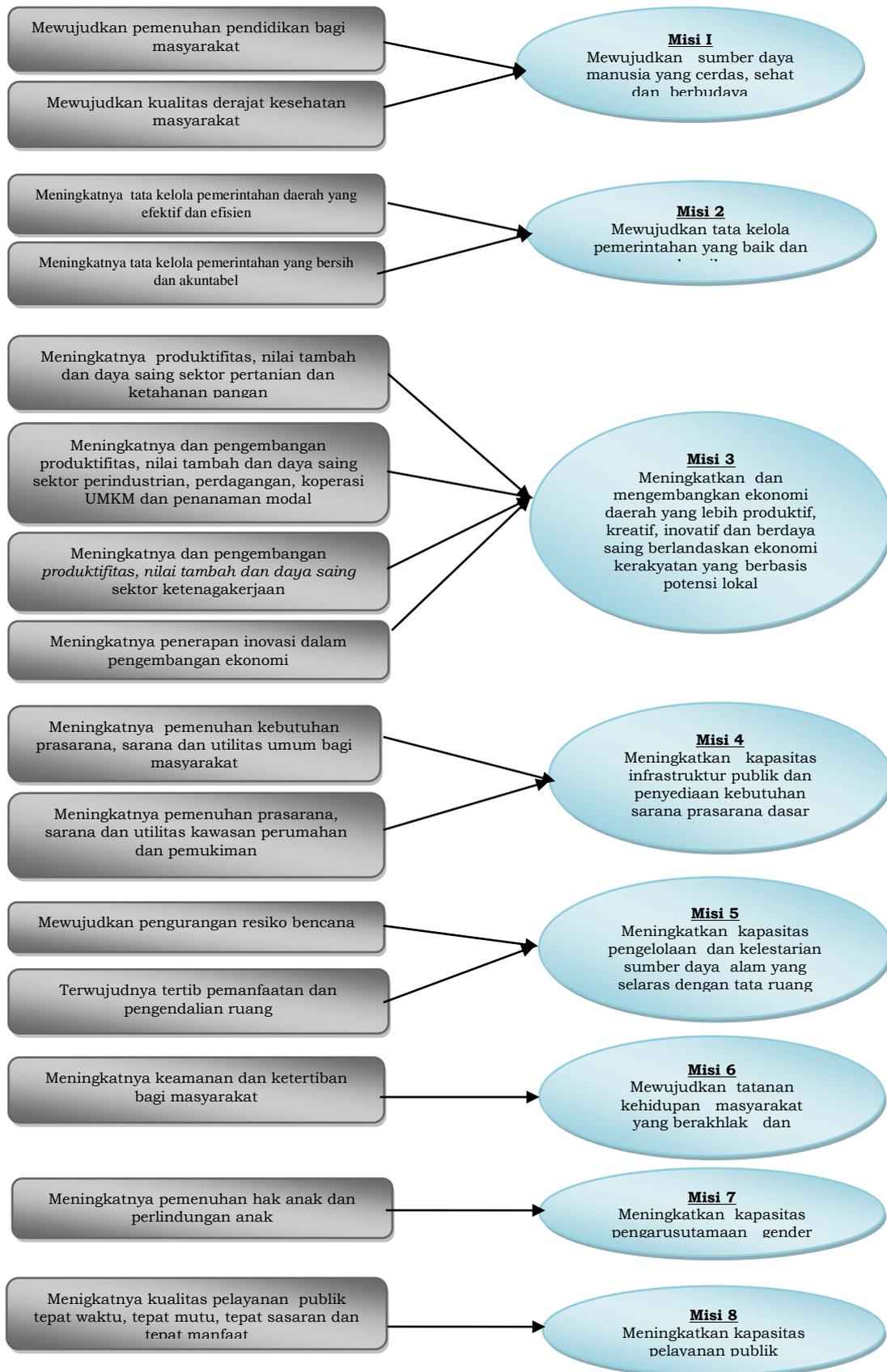
Tabel 2.2

Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021			
TAHAP KONSOLIDASI (Tahun 2016-2017)	TAHAP PEMANTAPAN (Tahun 2018-2019)	TAHAP PERCEPATAN (Tahun 2020-2021)	TAHAP PERWUJUDAN (Tahun 2021)
a. Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat. b. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. c. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya. d. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga, serta e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat. c. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup, dan d. Mewujudkan pengurangan resiko bencana.	a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. b. Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan c. Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila.

Sumber : RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Diagram 2.1 Korelasi antara Program Prioritas dan Misi Pembangunan Daerah



2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Program Prioritas sebagaimana tersebut di atas, untuk memberi gambaran yang lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2016, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,19
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	94,53
		1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,58
		1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	81,6
		1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	63,94
		1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,64
		1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02
		1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,1
		1.9	Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,78
		1.10	Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,55
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1	Persentase balita gizi buruk	%	0,75
		2.2	Angka kematian ibu melahirkan	Angka	15
		2.3	Angka kematian bayi	Angka	12,5
		2.4	Angka kematian balita	Angka	15,9
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	3.1	Persentase konsistensi perencanaan	%	71
		3.2	Persentase penggunaan data statistik	%	90
		3.3	Skor LPPD	Skor	2,7
		3.4	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81
		3.5	Skor LKjIP	Skor	60
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
		4.2	Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	1
		4.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor	5.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,50
		5.2	Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,4

	pertanian dan ketahanan pangan	5.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,5
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	6.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52
		6.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74
		6.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5
		6.4	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26
		6.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%)		
			PMDN	%	1,75
		PMA	%	2,25	
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor ketenagakerjaan	7.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74
		7.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	8.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	9.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26
		9.2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31
		9.3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	%	19.117
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	10.1	Persentase air minum layak	%	87,2
		10.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	88,22
		10.3	rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	%	50,00
		10.4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	8,73
		10.5	Persentase penanganan RTLH	%	5,48
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	11.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)		0
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	13.1	Angka kriminalitas	Angka	2,83
		13.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	41,78
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	14.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,48
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	15.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	90
		15.2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	26,68

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	6
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	13
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	15
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	12
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	9
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	11
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor ketenagakerjaan	2
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	1
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	18
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	3
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	4
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	2
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	8
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	1
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	2
	Jumlah	107



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program/kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabilitas Anggaran
3.4 Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	$\geq 99,9$	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,19	92,37	100,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	94,53	105,23	111,32
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,58	97,57	111,41
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	81,6	91,26	111,84
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	63,94	72,77	113,81
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,64	92,43	95,64
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,03	150
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,1	0,08	80
9	Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,78	99	101,25
10	Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,55	98	102,56
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,75	0,022	2,93
12	Angka kematian ibu melahirkan	Kasus	15	18	120,00
13	Angka kematian bayi	Angka	12,5	11,69	93,52
14	Angka kematian balita	Angka	15,9	0,463	2,91
15	Persentase konsistensi perencanaan	%	71	89,59	126,18
16	Persentase penggunaan data statistik	%	90	91	101,11
17	Skor LPPD	Skor	2,7	3,019	111,81
18	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81	82	101,23
19	Skor LKjIP	Skor	60	47,89	47,89
20	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00
21	Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	1	1	100,00
22	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00
23	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,50	12,32	107,13
24	Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,4	91,4	100,00
25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,5	91,5	100,00
26	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52	39,61	114,75
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,73	99,95
28	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	4,7	94,00
29	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26	0,25	96,15
30	Persentase kenaikan nilai investasi (%) :				
	PMDN	%	1,75	-0,01	-0,57
	PMA	%	2,25	-0,40	-17,78
31	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74	35,15	142,08
32	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80	100	125,00
33	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5	6	240,00
34	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26	56,26	101,81
35	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31	61,39	100,13
36	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	%	19,12	41,54	217,26

37	Persentase air minum layak	%	87,2	76,01	87,17
38	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	88,22	54,76	62,07
39	Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan	%	5	14,58	291,60
40	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	8,73	9,8	112,26
41	Persentase penanganan RTLH	%	5,48	3,75	68,43
42	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	0	0	#DIV/0!
43	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90	98	108,89
44	Angka kriminalitas	Angka	2,83	2,82	99,65
45	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	41,78	33,16	79,37
46	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,48	3,69	82,37
47	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	90	89,5	99,44
48	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	26,68	28,91	108,36

Catatan : Indikator Nomor 17, 18,19,20 dan 21 merupakan capaian kinerja tahun 2015, sedangkan target capaian tahun 2016 belum bisa disampaikan (masih dalam proses penilaian oleh lembaga yang berwenang).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 48 (empat puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 80,49 % dengan kriteria **Sangat Baik**, b. Sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 7,32 % dengan kriteria **Tinggi**, c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kriteria **Sedang**, d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kriteria **Rendah**, dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 7,32 % dengan kriteria **Sangat Rendah**. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **sangat baik**, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 33 (tiga puluh tiga), diantaranya :

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
6. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
7. Angka kelulusan SD/MI
8. Angka kelulusan SMP/ MTs
9. Persentase konsistensi perencanaan
10. Persentase penggunaan data statistik
11. Skor LPPD
12. Indeks Profesionalitas ASN
13. Opini BPK terhadap LKPD
14. Tingkat Muturitas SPIP
15. Tingkat Kapabilitas APIP
16. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
17. Indeks Kecukupan Pangan
18. Skor Pola Pangan Harapan
19. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
20. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
21. Persentase UMKM yang memiliki daya saing
22. Persentase kenaikan koperasi aktif
23. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
24. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani
25. Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan
26. Persentase jalan dalam kondisi baik (%)
27. Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
28. Luasan lahan irigasi dalam kondisi baik (%)
29. Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan
30. Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan
31. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
32. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
33. Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk

b. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,1 ≤ 90*** sebanyak 4 (empat), diantaranya :

1. Persentase air minum layak
2. Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
3. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus

- c. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja **65,1 ≤ 75** sebanyak 1 (satu), diantaranya :
1. Persentase penanganan RTLH
- d. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja **50,1 ≤ 65** sebanyak 1 (satu), diantaranya :
1. Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak
- e. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja **≤ 50** sebanyak 3 (tiga), diantaranya :
1. Skor LKjIP
 2. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMDN
 3. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMA

Berdasarkan [Capaian Kinerja Organisasi](#) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan [Skala Nilai Peringkat Kinerja](#) sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1

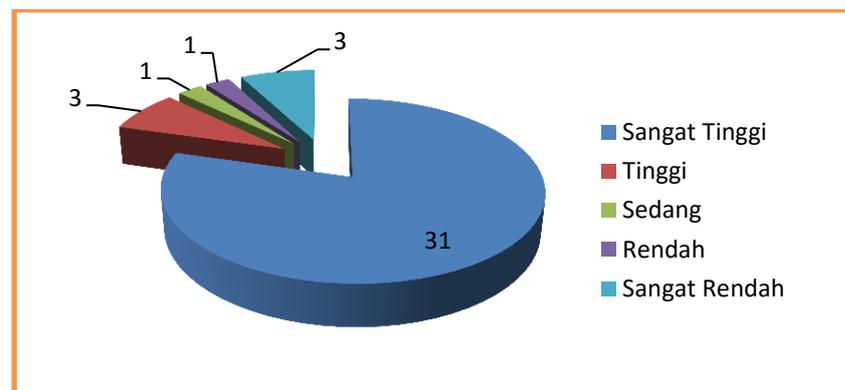


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. **Indikator Refresh**, dengan hasil: a. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 71,43 % dengan kreteria ***Baik (Berhasil Menekan)***, b. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 28,57 % dengan kreteria ***Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)***, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria ***baik***, diantaranya:
1. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
 2. Persentase balita gizi buruk
 3. Angka kematian bayi
 4. Angka kematian balita
 5. Angka kriminalitas

- b. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **tidak baik**, diantaranya:
1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
 2. Angka kematian ibu melahirkan

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif maka diperoleh data sebagaimana Diagram 3.2

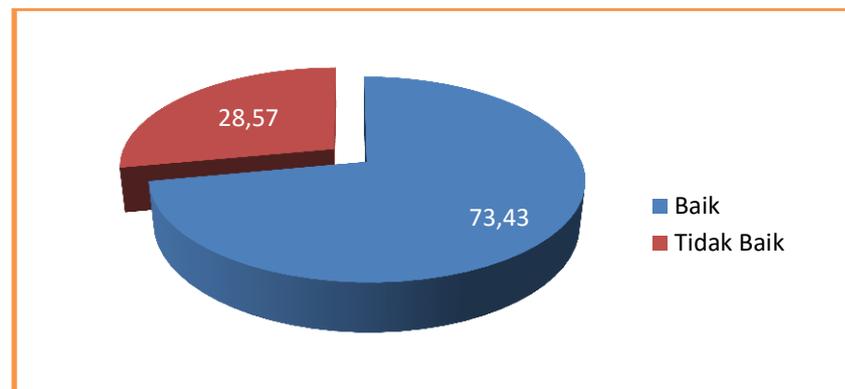


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Represif

- C. Disamping itu ada 1 (satu) indikator, baik target maupun realisasi masih 0 (kosong), yakni indikator Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa).

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat;

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun tetap berdasarkan pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5).

Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja PUS 2016 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerjaurusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sebagaimana Tabel 3.4

Tabel 3.4
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,19	92,19	92,37	100,20	93,19	99,12
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	94,53	94,53	105,23	111,32	97,03	108,45
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,58	87,58	97,57	111,41	90,08	108,31
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,6	81,6	91,26	111,84	84,10	108,51
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,94	63,94	72,77	113,81	66,44	109,53
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,64	96,64	92,43	95,64	96,69	95,59
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,03	150	0,01	33,33
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,1	0,1	0,08	80	0,05	62,50
9	Angka kelulusan SD/MI	97,78	97,78	99	101,25	97,83	101,20
10	Angka kelulusan SMP/MTs	95,55	95,55	98	102,56	95,60	102,51

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Salah satu upaya perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (*sampai ≤ 6 tahun*) yang dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi

pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran APK PAUD di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5
Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APK PAUD	54,36	55,73	58,32	92,19	92,37

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

2. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar

Angka partisipasi pendidikan dasar yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Angka Partisipasi Kasar yang dirumuskan dengan jumlah penduduk pada tahun ke- t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk pada tahun ke-t yang berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dikalikan seratus.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan dasar menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan Wajardikdas (pendidikan dasar sembilan tahun). Sebagai gambaran APK pendidikan dasar di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 3.6

Tabel 3.6
Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APKSD /MI /SDLB /Paket A	99,27	92,80	92,97	94,51	105,23
APK SMP/MTs/SMP/MTs/Paket B	94,24	94,73	87,04	87,58	97,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

Berdasarkan data Tabel 3.6 di atas ada beberapa karakteristik kenapa APK untuk jenjang pendidikan SD/MI ada yang menonjol, misalnya Kecamatan Wedi, Delanggu, Klaten Utara dan Klaten Tengah hal ini disebabkan karena ada beberapa sekolah swasta yang sebagian besar

siswanya berasal dari kecamatan lain. Umumnya anak bersekolah di SD swasta karena sekolah yang bersangkutan memiliki keunggulan khusus dan seazas dengan keinginan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pendidikan moralitas dan rasa nyaman untuk belajar.

Sementara itu, anak usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs di kecamatan Kebonarum, Karangnongko, Juwiring, Polaharjo dan Klaten Selatan lebih suka memilih di sekolah di luar kecamatannya sendiri, hal ini disebabkan karena jarak sekolah dan mutu sekolah menjadi pertimbangan utama kenapa memilih sekolah di luar kecamatannya, disamping ada tradisi untuk mengikuti kakak-kakak terdahulunya.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 77,39%, naik menjadi 91,26% pada tahun 2016. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2012 sudah mencapai 67,87% menjadi 72,77% pada tahun 2016, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APMSD /MI /SDLB /Paket A	77,39	78,46	79,13	81,59	91,26
APMSMP/MTs/SMPLB/Paket B	67,87	65,13	62,48	63,96	72,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

Dengan catatan, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogya dan Solo.

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2012 sudah mencapai 81,45%, naik menjadi 92,43% pada tahun 2016. Hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8
**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81,45	82,32	89,16	96,64	92,43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) angka putus sekolah yang diukur dengan jumlah anak putus sekolah bersifat fluktuatif, sekalipun adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sedikit banyak menekan jumlah anak putus sekolah. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
**Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten
Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	58	56	28	22	33
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	104	59	24	42	43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas tinggi angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengkondisikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

6. Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 99,66%, naik menjadi 99% pada tahun 2016. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami pada tahun 2012 sudah mencapai 98,20 % menjadi 98% pada tahun 2016, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL)
 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AL SD /MI /SDLB /Paket A	99,60	99,40	98,11	97,78	99
AL SMP/MTs/SMPLB/Paket B	98,20	98,47	96,93	95,55	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan pendidikan untuk semua bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat** terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Menengah;

4. Pendidikan Non Formal;
5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah.
- b. Kualitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha.
- c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1).
- d. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
- e. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- f. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas.
- g. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruping.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

- a. Perlunya peningkatan kualitas *pamong belajar* untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri.
- b. Perlunya kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas kelulusan siswa agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha.
- c. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1).
- d. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan.



2.Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya :1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

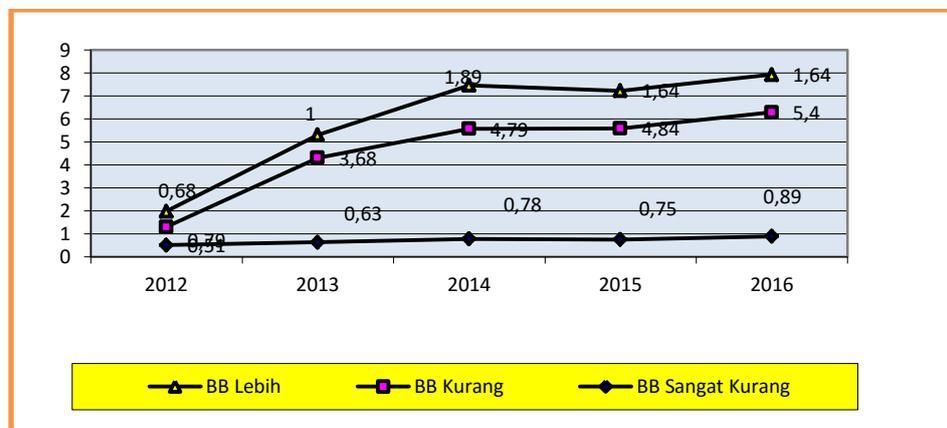
Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat sebagaimana Tabel 3.11

Tabel 3.11
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase balita gizi buruk	0,75	0,75	0,022	2,93	0,7	3181,82
2	Angka kematian ibu melahirkan	15	15	18	120,00	10	55,56
3	Angka kematian bayi	12,5	12,5	11,69	93,52	10	85,54
4	Angka kematian balita	15,9	15,9	0,463	2,91	15,3	3304,54

1. Persentase balita Gizi Buruk

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi, seperti kecamatan:Gantiwarno, Trucuk dan Jogonalan. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 3.1



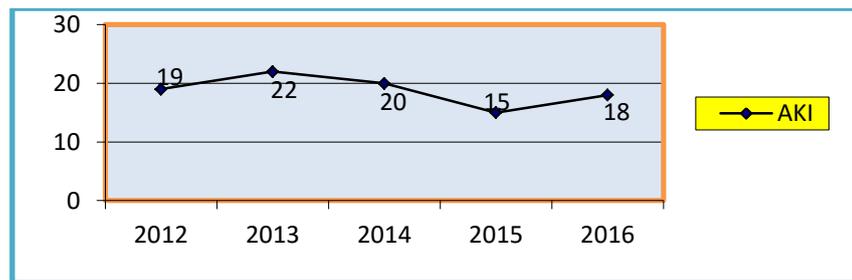
Grafik 3.1 Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2017

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 15 (atau 0,022% dari total jumlah anak 68.558) kasus anak menderita gizi buruk. Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan untuk bayi (PMTAS).

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah kecamatan: Wedi dan Juwiring. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 3.2



Grafik 3.2 Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2017

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 18 kasus kematian ibu melahirkan (atau AKI 106,84 dari total jumlah ibu melahirkan sebanyak 16.848). Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus kematian ibu melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

3. Angka Kematian Bayi

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti kecamatan: Bayat, Juwiring, Pedan dan Jogonalan . Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 3.3



Grafik 3.3 Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2017

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 197 kasus kematian bayi (atau AKB 11,69 dari total kelahiran hidup sebanyak 16.848). Sementara itu tercatat sebanyak 32 kasus kematian balita (atau Angka Kematian Balita 0,463 dari total anak balita sebanyak 69.069). Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus kematian bayi melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan kunjungan bayi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **peningkatan derajat kesehatan masyarakat** terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia; dan
13. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
- b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya :
 - Demam berdarah dengue .
 - Malaria
 - Filariatis
- c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - Penyakit menular Tuberculosis paru
 - Kusta penderita PB
 - Diare
 - Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - HIV
 - Kejadian luar biasa KIPI
- d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB dibawah garis merah dan Gizi buruk
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *antenatal care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.



3. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road mad* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien sebagaimana Tabel 3.12

Tabel 3.12

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

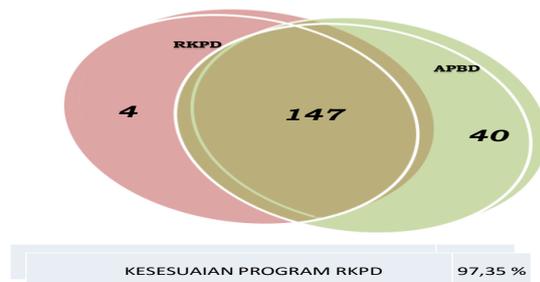
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase konsistensi perencanaan	71	71	89,59	126,18	90	99,54
2	Persentase penggunaan data statistik	90	90	91	101,11	100	91,00
3	Skor LPPD	2,7	2,7	3,019	111,81	2,85	105,93
4	Indeks profesionalitas ASN	81	81	82	101,23	90	91,11
5	Skor LKjIP	60	60	47,89	47,89	70	68,41

1. Persentase Konsistensi Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 merupakan masa transisi pelaksanaan dari implementasi dan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. RKPD menjadi pedoman untuk menyusun Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.

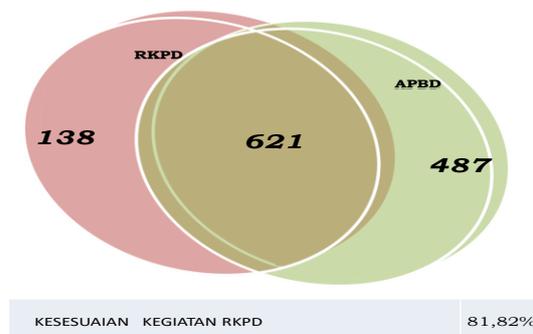
Berdasarkan analisis, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 berdasarkan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, dan jumlah program dan kegiatan dalam APBD yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) urusan dalam *diagram vent* sebagai berikut :

KESESUAIAN ANTARA PROGRAM RKPD DENGAN APBD TAHUN 2016



Berdasarkan *diagram vent* di atas, bahwa jumlah program RKPD sebanyak 151 yang tidak sesuai dengan program APBD sebanyak 4 program, sedangkan jumlah program dalam APBD sebanyak 187 yang tidak sesuai dengan RKPD sebanyak 40. Jumlah program yang sesuai antara RKPD dan APBD sebanyak 147 program. Sedangkan kesesuaian antara kegiatan RKPD dengan APBD sebagaimana diagram venn berikut.

KESESUAI ANTARA KEGIATAN RKPD DENGAN APBD TAHUN 2016



Berdasarkan *diagram vent* di atas, bahwa jumlah kegiatan RKPD sebanyak 759 yang tidak sesuai dengan program APBD sebanyak 138 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD sebanyak 1.108 yang tidak sesuai dengan RKPD sebanyak 487. Jumlah kegiatan yang sesuai antara RKPD dan APBD sebanyak 621 kegiatan.

2. Persentase Penggunaan Data Statistik

Perencanaan pembangunan wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung ***data dan informasi pelaksanaan pembangunan***.

Memperhatikan ketentuan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus didukung ***base line data dan informasi pembangunan*** yang akurat, dan tepat manfaat. Data dan informasi dalam : ***Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016*** merupakan jawaban untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya masyarakat Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing***.

3. Skor LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2015 dengan skor 3,02 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah).
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien** terdiri dari 15 (lima) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
6. Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
15. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat;
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang kredibel,

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

4. Indeks Profesionalitas ASN

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2016 bersifat sementara, karena baru dalam proses penghitungan.

5. Skor LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 mengupayakan pentingnya Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 dengan nilai 60, namun terealisasi 47,89 (dengan Kategori C). Perolehan skor 47,89 dengan kriteria agak kurang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 47,89 atau dengan predikat C. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 16,53
 - Pengukuran kinerja nilai 9,19
 - Pelaporan kinerja nilai 9,12
 - Evaluasi kinerja nilai 4,39
 - Capaian kinerja nilai 8,66
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a). Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b). Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a). Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b). Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.

- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

4. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator-indikator kinerja, diantaranya: Opini BPK terhadap LKPD, Tingkat Maturitas SPIP, dan Tingkat Kapabilitas APIP.

Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan penilaian indikator maturitas SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dilaksanakan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui aparat pengawas intern, sehingga didapat atas pelaksanaan pembangunan yang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Adapun capaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana Tabel 3.13

Tabel 3.13
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Tingkat Maturitas SPIP	1	1	1	100	3	33,33
3	Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	2	100	3	33,33

1. Opini BPK terhadap LKPD

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, satu prestasi yang belum pernah diperoleh selama ini. Kinerja ini merupakan komitmen bersama disemua jajaran pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2016 disajikan pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2013–2016**

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2013	WDP	Paragraf penjelas berupa: penataan usaha persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi.
2014	WDP	Paragraf penjelas berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengelolaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan.
2015	WTP	Paragraf penjelas berupa: berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016		Masih dalam proses penilaian

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2017.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.14 di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016.

2. Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) dan Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP), adapun pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 525 Obyek pemeriksaan, dengan pemeriksaan reguler sebanyak 432 Obrik dan dengan tujuan khusus/kasus sebanyak 93 Obrik. Dari sebanyak 432 Obrik yang telah ditindaklanjuti sebanyak 129 Obrik, masih dalam proses 51 Obrik, belum diproses 208 Obrik, dan tidak bisa ditindaklanjuti 44 Obrik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkaitsasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* terdiri dari 12 (dua belas) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
5. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan;
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

11. Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan; dan
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor.
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

5. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS pada masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana Tabel 3.15

Tabel 3.15
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor
Pertanian dan Ketahanan Pangan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	11,50	11,50	12,32	107,13	12,30	100,16
2	Indeks Kecukupan Pangan	91,4	91,4	91,4	100,00	91,75	99,62
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	91,5	91,5	100,00	92,75	98,65

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkaitsasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangandi Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Panganterdiri dari 9 (sembilan) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
4. Program Peningkatan produksi hasil peternakan;
5. Program Peningkatan kesejahteraan petani;
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
9. Program Rehabilitasi hutan dan lahan.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan.
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*).
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten.
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani, dan
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);.
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan

- e. Penciptaan sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

6. Sasaran Meningkatnya Dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal;

Sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan Penanaman Modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Adapun capaian Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal sebagaimana Tabel 3.16

Tabel 3.16
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52	39,61	114,75	35,5	111,58
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,73	99,95	19,55	95,81
3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	4,7	94,00	30	15,67
5	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26	0,25	96,15	0,6	41,67
6	Persentase kenaikan nilai investasi (%)						
	PMDN	%	1,75	-0,01	-0,57	2,75	0,36
	PMA	%	2,25	-0,4	-17,78	2,6	15,38

1. Persentase UMKM yang memiliki daya saing

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 54.981 UMKM, namun dari sebanyak 54.981 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing

produk yang kompetitif baru sebanyak 2.584 UMKM (atau 4,7%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM.

2. Persentase kenaikan koperasi aktif

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 977 koperasi, namun dari sebanyak 703 UMKM tersebut yang dinyatakan koperasi aktif baru sebanyak 72 (atau 72%) yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kecamatan.

3. Persentase kenaikan nilai investasi (%)

Perkembangan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dlm jutaan Rupiah) pada tahun 2015 tercatat sebanyak Rp. 221.977 juta, namun pada tahun 2016 hanya terealisasi sebanyak Rp. 220.629 Juta turun Rp.1.349 juta (atau turun 0,61%). Begitu juga dengan realisasi PMD, pada tahun 2015 sebanyak 5.836.620US\$ namun pada tahun 2016 hanya terealisasi sebanyak 3.150.720 U\$ turun 2.685.900 US\$ (atau turun 53,98%). Penurunan nilai investasi ini disebabkan karena masalah regulasi, juga tingginya harga tanah, sehingga para investor menarik diri dan mengalihkan usahanya ke daerah lain.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal terdiri dari 11 (sebelas) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
5. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
9. Pengembangan Produk Unggulan Wilayah;
10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
11. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

Serta:

- a. Belum berkembangnya Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah).
- b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM dibidang Industri Kecil, Menengah.
- c. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi .
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya .
- e. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk .
- f. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
- g. Belum semua IKM mebel memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan
- h. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitasSDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

Serta:

- a. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah);
- b. Peningkatan profesionalisme SDM dibidang Industri Kecil, Menengah;
- c. Penyadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- d. Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk;
- e. Penguatan jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
- f. Fasilitasi IKM mebel agar memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan
- g. Pengembangan produk berorientasi ekspor.

7. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana Tabel 3.17

Tabel 3.17
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data
Saing Sektor Ketenagakerjaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74	35,15	141,47	26	135,19
2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80	100	125,00	85	117,65

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data capaian indikator Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, terdapat sebanyak 2.784 tenaga kerja yang ditempatkan dari sebanyak 7.920 pencari kerja. Sedangkan indikator kasus hubungan pekerja dan perusahaan yang tertangani ada sebanyak 17 kasus yang tersebar di 851 perusahaan. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan :

- a. Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;

- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
- k. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh:
 - (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja;
 - (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja;
 - (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki;
 - (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

8. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi;

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2011 tumbuh 1,96%, dan tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,72%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,38%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 5,7 %.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah ditunjang adanya pengembangan ekonomi kreatif dan produktif dengan menerapkan produk-produk inovasi daerah. Upaya yang ditempuh dengan menggerakkan

masyarakat lewat hasil inovasi masyarakat, dan pengembangan teknologi tepat guna. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi sebagaimana Tabel 3.18

Tabel 3.18
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5	6	240,00	20	30

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkaitasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomidi Kabupaten Klaten, yang ditunjang capaian indikator persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan dari sebanyak 30 hasil inovasi masyarakat dan yang dikembangkan sebanyak 2 produk, yakni prototif hand tracktor dan perbaikan varitas beras Rajalele, Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomiterdiri dari 1 (satu) program, yakni:

1. Program Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan :

1. Belum optimalnya perencanaan berbasis hilirisasi hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat; dan
2. Masih rendahnya pemihakan kebijakan dan penganggaran untuk pengembangan produk pengembangan daerah.

Solusi :

1. Adanya skala prioritas penerapan hasil kreatifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

9. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah : Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana Tabel 3.19

Tabel 3.19
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26	56,26	101,81	65,8	85,50
2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31	61,39	100,13	63,24	97,07
3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (ha)	%	19,12	41,54	217,26	19.130	0,22

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini

disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari 21 (dua puluh satu) program, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Drainase / Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan;
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
7. Program Pengendalian Banjir;
8. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
10. Program Penataan Trotoar;
11. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
13. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
14. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
15. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
17. Program Pengembangan Perumahan;
18. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
20. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan.
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasiterutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasiterutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

10. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Saranadan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus

melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.20

Tabel 3.20
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan
 Perumahan dan Pemukiman**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase air minum layak	87,2	87,2	76,01	87,17	100	76,01
2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	88,22	88,22	54,76	62,07	100	54,76
3	Rasio penanganan kawasan kumuh perkotaan	50,00	5	14,58	291,60	100	14,58
4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	5,48	8,73	9,8	112,26	16	61,25
5	Persentase penanganan RTLH	13,73	5,48	3,75	68,43	34,25	10,95

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum).
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

11. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko

perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 3.21

Tabel 3.21
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Jumlah desa tangguh bencana (desa)	0	0	0	0	15	0

Pada tahun 2016 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum ditargetkan, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**desa paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, dan baru tahun 2017 ditargetkan adanya Desa Tangguh Bencana. Serta untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana terdiri dari 4 (empat) program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
3. Program Peningkatan Pengelolaan logistik; dan
4. Program Penanganan Darurat Bencana.

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.

Solusi :

1. Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu;
2. Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.

12. Sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga sebagai konsekuensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana Tabel 3.22

Tabel 3.22
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90	98	108,89	95	103,16

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; dan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang.
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
- f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-*

desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

3. Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat;

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat sebagaimana Tabel 3.23

Tabel 3.23
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka kriminalitas	2,84	2,83	2,82	99,65	2,77	101,81
2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,78	41,78	33,16	79,37	46,78	70,88

Angka kriminalitas dari tahun ke tahun dapat ditekan, karena dukungan masyarakat. Namun masalah PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan. Dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
3. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

5. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
6. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
- c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan
- d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan
- d. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

14. Sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

Perlindungan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 telah mencapai 411.599 jiwa (atau 31,40% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kuranghal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi.

Kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan

kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana Tabel 3.24

Tabel 3.24
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Peningkatan Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	5,21	4,48	3,69	82,37	4,3	85,81

Jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 tercatat sebanyak 368.095 anak. Dari sebanyak 368.095 anak tersebut yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 13.251 anak (atau 3,69%), dari bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang bekerja di bawah umur, dan penyandang disabilitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkaitasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak yakni :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

15. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 992.889 orang penduduk yang wajib KTP, dari sebanyak 1.300.706 orang.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat sebagaimana Tabel 3.25

Tabel 3.25
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	89,38	90	89,5	99,44	99,6	90,77
2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	16,68	26,68	28,91	108,36	9,14	31,62

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 992.889 orang, dan jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 362.436 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat terdiri dari 1(satu) program, diantaranya:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganannya administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.2.133.553.875.500,- (*dua trilyun seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.2.018.353.368.100,- (*dua trilyun delapan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah*), dan teralisasi sebanyak Rp.2.174.550.555.820,- (*dua trilyun seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.168.467.842.500,- (*seratus enam puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dan pada tahun 2016 menjadi Rp.165.620.468.100,- (*seratus enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah*), dan teralisasi sebanyak Rp.203.699.708.000,- (*dua ratus tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*).

1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.281.203.816.000,- (*satu trilyun dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*), pada tahun 2016 diasumsikan menjadi sebesar Rp.1.190.679.782.000,- (*satu trilyun seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.1.482.193.569.820,- (*satu trilyun empat ratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*).

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada tahun 2015 sebesar Rp.683.882.217.000,- (*enam ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*) pada tahun 2016 diasumsikan menjadi sebesar Rp. 662.053.118.000,- (*enam ratus enam puluh dua milyar lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.488.657.278.000,- (*empat ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Sedangkan potensi belanja daerah sebagai berikut:

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.2.431.803.080.408,- (*dua trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga juta delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), pada tahun 2016 diperkirakan menjadi sebesar Rp.2.077.203.519.500,- (*dua trilyun tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*) dan teralisasi sebanyak Rp.2.567.449.419.713,- (*dua trilyun lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 sebesar Rp.1.773.162.203.448,- (*satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.824.397.376.500,- (*satu trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.1.973.414.595.859,- (*satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung (mendanai program dan kegiatan) pada tahun 2015 sebesar Rp.658.640.876.960,- (*enam ratus lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*), dan pada tahun 2016 diasumsikan menjadi sebesar Rp.252.806.143.000,- (*dua ratus lima puluh dua milyar delapan ratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*), dan terealisasi

sebanyak Rp.594.034.823.854,- (*lima ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*).

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.67.050.151.400,- (*enam puluh tujuh milyar lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*) atau turun 78,36% dibanding tahun 2015 sebesar Rp.309.805.911.908,- (*tiga ratus sembilan milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan Rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,- (*delapan milyar dua ratus juta rupiah*) atau turun 29,05% dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 11.556.707.000,- (*sebelas milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*). Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 8.200.000.000,- (*delapan milyar dua ratus juta rupiah*) dipergunakan untuk pembentukan Dana Cadangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), dan penyertaan modal/investasi Pemerintah daerah sebesar Rp. 3.200.000.000,- (*tiga milyar dua ratus juta rupiah*).

Tabel 3.26

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Anggaran		
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,19	92,37	100,20	35.204.950.000	32.910.930.421	93,48
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	94,53	105,23	111,32			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,58	97,57	111,41			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	81,6	91,26	111,84			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	63,94	72,77	113,81			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,64	92,43	95,64			
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,03	150			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,1	0,08	80			
		Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,78	99	101,25			
		Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,55	98	102,56			
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Persentase balita gizi buruk	%	0,75	0,022	2,93	41.513.689.900	37.697.104.612	90,81
		Angka kematian ibu melahirkan	Angka	15	18	120,00			
		Angka kematian bayi	Angka	12,5	11,69	93,52			
		Angka kematian balita	Angka	15,9	0,463	2,91			
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase konsistensi perencanaan	%	71	89,59	126,18	38.315.472.150	27.147.449.429	70,85
		Persentase penggunaan data statistik	%	90	91	101,11			
		Skor LPPD	Skor	2,7	3,02	111,81			
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81	82	101,23			
		Skor LKjIP	Skor	60	47,89	47,89			
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00	36.859.534.200	29.487.587.928	80,00
		Tingkat Mutualitas SPIP	Tingkat	1	1	100,00			
		Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00			
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,50	12,32	107,13	6.587.494.000	6.543.675.648	99,33
		indeks kecukupan pangan	Indeks	91,4	91,4	100,00			

	sektor pertanian dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,5	91,5	100,00			
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52	39,61	114,75	9.001.646.000	6.245.480.063	69,38
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,73	99,95			
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	4,7	94,00			
		Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26	0,25	96,15			
		Persentase kenaikan nilai investasi (%) :							
		PMDN	%	1,75	-0,01	-0,57			
		PMA	%	2,25	-0,40	-17,78			
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74	35,15	142,08	1.021.000.000	305.975.320	29,97
		Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80	100	125,00			
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5	6	240,00	400.000.000	356.192.880	89,05
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26	56,26	101,81	107.651.427.900	81.028.051.343	75,27
		Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31	61,39	100,13			
		Luasan lahan irigasi dalam kondisi baik (%)	ha	19,12	41,54	217,26			
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	Persentase air minum layak	%	87,2	76,01	87,17	15.120.180.700	13.263.336.080	87,72
		Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	88,22	54,76	62,07			
		Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan	%	5	14,58	291,60			
		Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	8,73	9,8	112,26			
		Persentase penanganan RTLH	%	5,48	3,75	68,43			
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)		0	0	#DIV/0!	1.268.600.000	953.940.470	75,20
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90	98	108,89	825.000.000	696.858.700	84,47

	pengendalian ruang								
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	Angka kriminalitas	Angka	2,83	2,82	99,65	2.406.090.000	2.203.876.185	91,60
		Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	41,78	33,16	79,37			
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,48	3,69	82,37	4.000.000	4.000.000	100
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	90	89,5	99,44	1.050.000.000	822.862.125	78,37
		Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	26,68	28,91	108,36			
J u m l a h							297.229.084.850	239.262.709.004	80,50
Jumlah Belanja Pendukung							296.805.739.004	258.619.83.174	86,02
Jumlah Belanja Langsung							594.034.823.854	497.882.552.178	83,81

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 107 program. Serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ditetapkan sebanyak 23 sasaran. Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Klaten dengan didukung sebanyak 148 Program.

Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan daerah ditetapkan pula APBD Tahun 2016 dengan didukung sebanyak 187 Program. Pelaksanaan program APBD berhasil menekan efisiensi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 96.152.271.676,- (atau 16,19%) dari total belanja langsung yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program utama sebesar Rp. 57.966.375.846,- (atau 19,50%), dan efisiensi untuk program pendukung sebesar Rp.38.185.895.830,- (atau 12,87%)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2016 secara umum merupakam gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

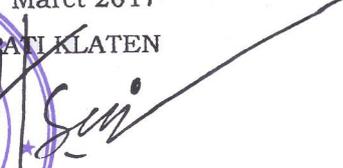
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 48 (empat puluh delapan) IKU (*Indikator Kinerja Utama*) yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (enam) indikator yang sifatnya refresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

- A. **Indikator Progresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 80,49 % dengan kreteria **Sangat Baik**, b. Sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 7,32 % dengan kreteria **Tinggi**, c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kreteria **Sedang**, d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kreteria **Rendah**, dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 7,32 % dengan kreteria **Sangat Rendah**,
- B. **Indikator Refresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 5 (lima) IKU atau sebanyak 71,43 % dengan kreteria **Baik (Berhasil Menekan)**, b. Sebanyak 2 (dua) IKU atau sebanyak 28,57 % dengan kreteria **Kurang Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)**,

4.2 Saran Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 wajib kiranya hasil LKjIP Tahun 2016 dapat dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan : (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

Klaten, Maret 2017
Plt. BUPATI KLATEN

Hj. SRI MULYANI



LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2016

1. Penghargaan Presiden Republik Indonesia DANA RAKCA 2016 untuk Daerah Berkinerja Baik;
2. Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
3. Penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Investment Award Nomine Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Terbaik Tahun 2016;
4. Sertikat Wahana Tata Nugraha Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2016;
5. Piagam dan Penghargaan TP PKK Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Juara Harapan III Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia XXXVI Tahun 2016;
6. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada SMPN 1 JOGONALAN kabupaten Klaten sebagai SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL Tahun 2016;
7. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah atas Prestasinya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan sebelumnya.

LAMPIRAN II

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

BAGAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2008

